




# Anak Guru Daftar Sekolah Pakai SKTM

■ Ombudsman Dorong Ada Verifikasi Faktual

  
*Informasi yang kami terima itu masih bersifat umum. Ini masih mau kita telusuri. Dia masuk melalui jalur SKTM. Dan SKTM itu diperoleh dari desa tetangga, karena di desanya sendiri saat diminta tidak mau ngasih.*

**Budhi Masthuri**  
Kepala ORI Perwakilan DIY

**YOGYA, TRIBUN** - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY perlu mencermati serius kemungkinan adanya tindakan sabotase Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh warga dari kalangan ekonomi mapan. Terutama SKTM untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY mendorong Disdikpora DIY maupun dinas pendidikan kabupaten/kota merealisasikan verifikasi faktual secara masif melalui jajarannya, yakni sekolah-sekolah se-DIY.

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, menjelaskan, telah menerima lagi dua masukan perihal dugaan manipulasi data SKTM untuk keperluan PPDB. Pertama, masih bersifat informasi. Kedua, sudah bersifat laporan.

Informasi manipulasi data SKTM untuk keperluan PPDB yang diterima ORI Perwakilan DIY tersebut terjadi di wilayah kabupaten.

● ke halaman 11

## Anak Guru

• Sambungan Hal 1

Informasinya ada anak di mana ayahnya penstunan pegawai bank dan ibunya guru.

mendaftar ke SMA negeri pakai SKTM.

"Informasi yang kami terima itu masih bersifat umum. Ini masih mau kita telusuri. Dia masuk melalui jalur SKTM. Dan SKTM itu diperoleh dari desa tetangga, karena di desanya sendiri saat diminta tidak mau ngasih," katanya, Jumat (13/7).

Akan tetapi, menurut Budhi, informasi awal dari masyarakat tersebut belum bisa dimasukkan sebagai laporan. Karenanya, ia menyarankan kepada mereka yang mengetahui kejadian tersebut agar memasukkan laporan melalui Sekretariat Bersama (Setber) Pos Pengaduan PPDB DIY 2018.

"Ini masih umum sekali informasinya. Belum menyebutkan nama siswanya. Memang sekolahnya disebutkan, tapi kita belum bisa menyampaikan," ucapnya.

Sementara itu, satu kasus lain yang bersifat laporan sudah ditindaklanjuti oleh ORI Perwakilan DIY. Hasil pantauan lapangan atas laporan itu adalah pemakai SKTM tidak meyakinkan masuk kategori keluarga miskin.

"Dari bentuk rumahnya, relatif bagus. Kamudian, lantainya tidak tanah. Kalau kategori miskin penerima KMS (Kartu Menuju Sejahtera) itu kan lantainya tanah, lalu tidak punya kendaraan. Makanya, kami menyatakan itu tidak cukup meyakinkan," cetusnya.

ORI Perwakilan DIY pun belum bisa menyimpulkan kalau mereka berasal dari keluarga mampu. Sebab, untuk kesimpulan itu, ORI Perwakilan DIY harus tahu penghasilannya berapa dan sebagainya. "Disdikpora DIY perlu menelusuri," ujarnya.

Sesuai hasil rapat bersama pada beberapa hari silam, kata dia, Disdikpora DIY sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan saran dari Setber Pos Pengaduan PPDB DIY 2018. Disdikpora DIY harus melakukan *outing* atau verifikasi faktual di lapangan melalui jajarannya.

"Kondisi rumahnya seperti apa, lalu penghasilan, atau ekonomi orangtuanya bagaimana, itu yang masih kita tunggu, seperti apa progresnya," jelasnya.

Budhi mengungkapkan, nantinya, tugas melakukan verifikasi faktual akan diserahkan dari Disdikpora DIY kepada masing-masing sekolah. Sebab, jika semua di-handle oleh dinas, dikawatirkan waktu yang tersedia tak mencukupi.

"Kalau dibebankan kepada dinas, ya cukup berat, karena ada 1600-an yang pakai jalur SKTM, sementara waktunya terbilang pendek. Selanjutnya, tergantung hasil verifikasi itu, dinas yang punya kewenangan," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan *Tribun Jogja* sebelumnya, Disdikpora DIY akan melakukan verifikasi kepada peserta didik baru yang mendaftar menggunakan SKTM.

Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi, Disdikpora DIY, Didik Wardaya, mengatakan, verifikasi dilakukan oleh pihak sekolah.

"Berapa lama belum ditentukan. Sekolah kan juga bagian dari Disdik, nanti sekolah akan verifikasi lapangan," kata Didik, Kamis (12/7).

Jika memang ditemukan SKTM dimiliki oleh keluarga mampu, pihak Disdikpora akan tetap mengeluarkan siswa tersebut. Disdikpora akan membiarkan kekosongan (kursi) yang ditinggalkan siswa tersebut. "Ya biar

**Sesuai aturan, selama PPDB dan PLS tidak boleh ada pungutan. Pengadaan seragam menjadi kewajiban orang tua dan bukan kewajiban pihak sekolah.**

kosong saja, nanti kalau buka pendaftaran lagi, kita diprotes pihak sekolah swasta. Ya sudah biar saja kosong, memang ada sekolah yang kekurangan siswa," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, ada 32.563 pendaftar PPDB. Pendaftar yang meminta rekomendasi SKTM ada 7.756, sedangkan yang diterima di SMA negeri ada 6.648. "Yang tidak di negeri, tetapi di swasta, harapannya pihak sekolah tidak memberatkan. Sekolah swasta juga menerima Bos dan Bosda, jadi pihak sekolah harus membantu siswa yang memang miskin," ungkapnya.

### Pengenalan Lingkungan Sekolah

Disdikpora Kulonprogo telah mengirimkan surat edaran khusus terkait masa pengenalan lingkungan sekolah (PLS). Di dalamnya mencakup larangan kepada sekolah untuk mengambil pungutan tertentu dari siswa baru.

Surat Edaran bernomor 421/2560 bertanggal 13 Juli 2018 itu menyebut masa PLS berlangsung tiga hari, pada 16-18 Juli 2018. Surat edaran tersebut secara tegas menyebutkan bahwa sekolah dilarang memungut biaya, maupun bentuk pungutan lainnya.

Hal sama berlaku untuk pengadaan seragam sekolah hingga larangan tindak perpeloncon.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 34/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB 2018, dan Peraturan Kepala Disdikpora Kulonprogo tentang Petunjuk Teknis PPDB, sekolah juga dilarang melakukan pungutan apapun dalam proses PPDB. Pelanggaran bakal berbuntut panjang dengan sanksi pidana maupun sanksi kepegawatan.



| Instansi            | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 16 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005